

# Presiden Jokowi: Jaga Integritas dan Stabilitas Sistem Perekonomian dan Keuangan

Updates - [INDONESIASATU.CO.ID](https://indonesiasatu.co.id)

Jan 14, 2021 - 17:48

**‘Jaga Integritas dan Stabilitas Sistem Perekonomian dan Sistem Keuangan’**

Presiden RI, Joko Widodo



*Presiden RI Joko Widodo*

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo menegaskan urgensi untuk menjaga integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan stabilitas sistem keuangan, khususnya di tengah penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi

nasional.

Pernyataan ini disampaikan dalam kegiatan Pertemuan Koordinasi Tahunan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme pada Kamis (14/1/2021), yang diselenggarakan secara virtual.

Dalam pertemuan yang diinisiasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ini, Presiden menyampaikan harapannya kepada seluruh pemangku kepentingan anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APUPPT) untuk terus memperkuat sinergi dalam mendukung penegakan hukum, termasuk menjamin pertumbuhan sistem keuangan dan perekonomian yang kuat, sehat, dan berkesinambungan.

Pertemuan Koordinasi Tahunan ini dihadiri seluruh pemangku kepentingan di bidang APUPPT, yang meliputi Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), Lembaga Penegak Hukum, Anggota Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Kementerian/Lembaga terkait, Penyedia Jasa Keuangan, Penyedia Barang dan Jasa, Perguruan Tinggi, sejumlah Asosiasi profesi, dan PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan.

Koordinasi Tahunan juga mengangkat berbagai subtema antara lain peningkatan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ekonomi, efektivitas peningkatan asset recovery, dan persepsi positif peran pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT dalam mendukung perekonomian Indonesia dan menentukan keanggotaan Indonesia di organisasi internasional anti-pencucian uang, Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).

Kepada seluruh aparat penegak hukum, Presiden Jokowi mengharapkan adanya komitmen dan konsistensi agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ekonomi dan keuangan dapat diikuti dengan penerapan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hal ini diperlukan guna memberi efek jera kepada pelaku sekaligus membuat orang lain menjauhkan diri untuk melakukan kejahatan (deterrent effect). Yang tidak kalah penting, penerapan pasal TPPU diharapkan membantu pemulihan kerugian negara (asset recovery) secara signifikan. "Penerapan pasal TPPU akan membawa keberhasilan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana ekonomi secara menyeluruh," tegas Presiden.

Sementara itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan harapannya kepada PPATK agar dapat memainkan peran lebih dalam berkontribusi membantu program-program pemerintah. Bagi Presiden, PPATK dapat memberi kontribusi signifikan dalam mendukung pemberantasan tindak pidana ekonomi seperti korupsi, hingga dapat berperan dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial. Pengawasan bantuan sosial menjadi hal yang krusial, guna memastikan pemulihan ekonomi nasional yang di antaranya melalui bantuan sosial dapat dirasakan langsung oleh yang berhak menerimanya.

PPATK juga diharapkan dapat memainkan peran penting untuk mengawal pengisian jabatan-jabatan strategis melalui peran aktif penelusuran rekam jejak atas calon-calon pejabat tinggi negara. "Kita semua berharap amanah di berbagai jabatan-jabatan strategis dapat diisi oleh sosok yang tidak hanya

memiliki kompetensi yang mumpuni, tetapi rekam jejak transaksi keuangan yang baik,” kata Presiden Jokowi.

Dalam arahannya, Presiden Jokowi juga mengapresiasi terobosan kerja sama dalam bentuk Kemitraan Strategis Pemerintah dan Swasta (Public-Private Partnership / PPP). Kemitraan yang dikenal dengan nama INTRACNET ini dibentuk sebagai upaya menangani persoalan struktural yang mengganggu integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, termasuk dalam mengoptimalkan upaya penyelamatan aset (asset recovery).

### **Cegah Pendanaan Terorisme**

Di samping menekankan urgensi penjagaan atas integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan, Presiden Jokowi juga berharap agar penegak hukum dapat terus melakukan upaya disrupsi pencegahan pendanaan terorisme. Presiden antara lain mencontohkan praktik penyimpangan donasi dari masyarakat, yang pada akhirnya justru digunakan sebagai sarana pendanaan aksi teror.

Presiden berpesan agar seluruh pemangku kepentingan di bidang anti-pendanaan terorisme dapat mengoptimalkan peran Satuan Tugas Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (Satgas DTTOT) sebagai salah satu instrumen pertukaran informasi yang cepat, tepat, dan akurat agar upaya disrupsi aktivitas pendanaan terorisme dapat berjalan secara efektif. (\*\*\*)